



Politik Ekonomi Tambang Timah illegal di Desa Balai Benih Bangka Selatan

Chandra Ayu Riski¹, Arista Aulia², Risky Ananda Putri³

^{1,2,3} Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institusi Universitas Bangka Belitung

1ayuettekudasai@gmail.com, 2itaaa2602@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to examine the practice of illegal tin mining in the Balai Benih area, South Bangka Regency, from an eco-political perspective. The prevalence of illegal mining in the region has led to social, economic and natural resource management issues, as well as causing environmental damage. Data was collected through field observations, in-depth interviews and documentary research for this study, which was designed as a case study. Qualitative data analysis techniques were then used to analyse the data through steps such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study shows that illegal tin mining has altered the environment, damaged flora, degraded environmental quality, and created abandoned mine pits that pose a potential danger to the community. From a socio-economic perspective, some members of the community rely on illegal mining as their source of income because there are no alternative jobs. From an eco-political perspective, this phenomenon indicates that there is a link between economic interests, access to natural resources, and power relations between actors that enable illegal mining activities to continue. Furthermore, the lack of oversight and enforcement of mining policies highlights a discrepancy between formal regulations and conditions on the ground. Therefore, to achieve more sustainable and ecologically just management of natural resources, stronger oversight, consistent law enforcement, and economic alternatives for communities are required.

Keywords Environmental Politics, Illegal Tin Mining, Extractivism, Environmental Damage, South Bangka.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik penambangan timah ilegal di wilayah Balai Benih, Kabupaten Bangka Selatan, dari sudut pandang politik ekologi. Jumlah pertambangan ilegal yang terjadi di daerah tersebut menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam selain menyebabkan kerusakan lingkungan. Data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dikumpulkan untuk penelitian, yang dirancang sebagai studi kasus. Kemudian, teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Studi menunjukkan bahwa pertambangan timah ilegal telah mengubah lingkungan, merusak flora, menurunkan kualitas lingkungan, dan menciptakan lubang-lubang bekas tambang yang berpotensi membahayakan masyarakat. Dari perspektif sosial ekonomi, sebagian masyarakat mengandalkan pertambangan ilegal sebagai sumber penghasilan mereka karena tidak ada pekerjaan alternatif. Dari sudut pandang politik ekologi, fenomena ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepentingan ekonomi, akses ke sumber daya alam, dan hubungan kekuasaan antaraktor yang memungkinkan aktivitas tambang ilegal berlanjut. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pertambangan menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan formal dan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan secara ekologis, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan alternatif ekonomi bagi masyarakat diperlukan.

Kata Kunci Politik Ekologi, Pertambangan Timah Ilegal, Ekstraktivisme, Kerusakan Lingkungan, Bangka Selatan.

1. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah penghasil timah utama di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga periode kontemporer, aktivitas pertambangan timah telah membentuk struktur ekonomi, sosial, dan politik masyarakat setempat (Erman, 2010; Yunianto, 2009). Ketergantungan terhadap sektor ini menjadikan timah sebagai komoditas strategis, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan lingkungan yang kompleks, terutama ketika aktivitas dilakukan secara ilegal dan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan (Rismika & Purnomo, 2019; Haryadi et al., 2018). Pasca reformasi dan penerapan desentralisasi, tata kelola sumber daya alam mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini membuka ruang partisipasi daerah yang lebih luas, tetapi sekaligus

memunculkan tantangan dalam aspek pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan (Indra, 2014; Firsantara & Hikmah, 2024).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa maraknya pertambangan timah inkonvensional di Bangka Belitung berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan serta tingginya insentif ekonomi dari komoditas timah di pasar global (Erman, 2021; Suyanto & Purwanto, 2022). Kondisi tersebut menciptakan celah yang memungkinkan eksploitasi timah berlangsung di luar mekanisme perizinan resmi. Fenomena tambang ilegal juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi masyarakat lokal. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan sering kali membentuk toleransi sosial terhadap praktik pertambangan tidak berizin, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan alternatif mata pencaharian (Prabowo et al., 2023). Dalam situasi tersebut, aktivitas tambang dipandang sebagai strategi bertahan hidup, meskipun membawa konsekuensi ekologis dalam jangka Panjang. Secara normatif, pengelolaan pertambangan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan kewajiban perizinan, reklamasi, dan pascatambang. Namun sejumlah studi menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali berkaitan dengan lemahnya tata kelola serta koordinasi antar lembaga, sehingga kebijakan yang ada tidak selalu efektif dalam implementasinya (Lestari & Nugroho, 2021; Arifin et al., 2023).

Sejak zaman kolonial hingga saat ini, komoditas timah telah memainkan peran penting dalam struktur ekonomi daerah selain memberikan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat lokal. Namun, bergantung pada sektor pertambangan menyebabkan banyak masalah, terutama terkait kerusakan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang lemah. Fenomena pertambangan timah ilegal atau inkonvensional telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut (Erman, 2021; Suyanto & Purwanto, 2022). Faktor struktural seperti tingginya permintaan timah di pasar, kurangnya lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat lokal, dan kurangnya pengawasan daerah terhadap aktivitas tambang merupakan penyebab utama dari banyaknya tambang ilegal. Studi menunjukkan bahwa masyarakat Bangka Belitung sering menggunakan pertambangan informal sebagai strategi ekonomi untuk bertahan hidup, terutama dalam situasi di mana sumber daya ekonomi lainnya terbatas (Prabowo et al., 2023). Dalam situasi ini, penambangan ilegal dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap peraturan, tetapi juga sebagai fenomena sosial-ekonomi yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, transformasi digital, serta perubahan struktur ekonomi yang memengaruhi pola eksploitasi sumber daya dan implementasi kebijakan. Integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem bisnis maupun tata kelola telah menciptakan peluang baru untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif, meskipun tantangan implementasinya masih cukup besar terutama di negara-negara berkembang (Suhara et al., 2026). Selain itu, strategi bisnis berbasis digital telah mengubah perilaku ekonomi masyarakat dan meningkatkan kebutuhan terhadap aktivitas ekstraksi sumber daya yang mendukung perkembangan industri dan teknologi (Endrawati et al., 2022). Peran digital marketing dan teknologi informasi yang semakin berkembang juga memperkuat interaksi antaraktor ekonomi sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya dan kegiatan investasi (Siahaan et al., 2023; Najoran & Mawuntu, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan, kepercayaan, dan reputasi organisasi merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi pemangku kepentingan serta legitimasi institusi, termasuk pada sektor yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (Ariyono et al., 2022; Iristian & Irdiana, 2019). Selain itu, penerapan teknologi berbasis data dan berbagai alat analisis digital telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan serta memperluas akses informasi bagi para pemangku kepentingan (Pramudito et al., 2023; Judijanto et al., 2024). Namun demikian, tata kelola yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga kapasitas kelembagaan yang kuat, akuntabilitas yang tinggi, serta kepercayaan publik untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap berjalan sejalan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan (Anggraini & Khairunnisa, 2025; Najoran & Liow, 2023).

Fenomena ini juga terjadi di Balai Benih Kabupaten Bangka Selatan, ada beberapa lokasi penambangan timah ilegal terus berlangsung. Pertambangan dilakukan tanpa perencanaan teknis yang memadai dan seringkali meninggalkan lubang-lubang bekas tambang tanpa reklamasi. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan bentang alam, penurunan kualitas tanah, kerusakan vegetasi, dan risiko keselamatan bagi masyarakat di sekitar tambang. Selain itu, ada perbedaan antara kerangka regulasi resmi dan praktik pengelolaan sumber daya alam di lapangan karena pertambangan beroperasi di wilayah dengan fungsi tertentu (Lestari & Nugroho, 2021). Dari sudut pandang politik ekologi, pertambangan dianggap sebagai bukan hanya masalah teknis lingkungan tetapi juga sebagai konsekuensi dari konflik kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan pembagian akses ke sumber daya alam. Interaksi antara aktor negara, pasar, dan masyarakat lokal sering kali memengaruhi eksploitasi sumber daya; masing-masing aktor memiliki kepentingan berbeda dalam pemanfaatan sumber daya (Robbins, 2012). Oleh karena itu, tindakan ekstraktivisme tambang timah ilegal dapat dianggap sebagai representasi dari hubungan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang membentuk pola pengelolaan sumber daya di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus operandi pertambangan timah ilegal yang terjadi di wilayah Balai Benih Bangka Selatan, siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan bagaimana hubungan kepentingan antara para aktor tersebut berdampak pada kelangsungan operasi tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan bagaimana praktik ekstraktivisme tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan kondisi lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika eksploitasi sumber daya alam dan masalah pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan timah dengan menggunakan pendekatan politik ekologi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika praktik pertambangan timah ilegal di kawasan Balai Benih Bangka Selatan serta relasinya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam perspektif politik ekologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, terutama terkait praktik ekstraktivisme, persepsi masyarakat, serta interaksi berbagai aktor yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial di lapangan melalui penggalian pengalaman, pandangan, serta interpretasi dari para aktor yang terlibat dalam fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2020).

Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi spesifik yang memiliki karakteristik dan dinamika tertentu terkait praktik pertambangan timah ilegal. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara jelas (Yin, 2021). Dalam konteks penelitian ini, studi kasus digunakan untuk menganalisis secara komprehensif praktik ekstraktivisme tambang timah ilegal di kawasan Balai Benih Bangka Selatan serta interaksi antara aktor sosial, ekonomi, dan institusi yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Lokasi penelitian berada di kawasan Balai Benih Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini dipilih karena terdapat indikasi aktivitas pertambangan timah ilegal yang berlangsung di sekitar kawasan tersebut. Aktivitas pertambangan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat di sekitarnya, sehingga menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam dan politik ekologi. Selain itu, kawasan ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tertentu dengan praktik eksploitasi sumber daya yang terjadi di lapangan. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan sumber daya alam yang kompleks serta menunjukkan adanya keterkaitan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kebijakan dalam praktik pertambangan di tingkat lokal (Arifin et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lingkungan di sekitar lokasi penelitian, aktivitas pertambangan yang berlangsung, serta perubahan bentang alam yang diakibatkan oleh kegiatan tambang. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kerusakan lingkungan seperti lubang bekas tambang, perubahan struktur tanah, serta kondisi vegetasi di sekitar area pertambangan. Observasi juga membantu peneliti memahami interaksi sosial yang terjadi di sekitar aktivitas pertambangan serta dinamika aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut (Moleong, 2021).

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta pandangan para informan terhadap aktivitas pertambangan timah ilegal di kawasan Balai Benih Bangka Selatan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat lokal, pekerja tambang, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai dinamika pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai alasan masyarakat terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, relasi kepentingan antar aktor, serta dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar (Creswell & Creswell, 2020).

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan aktivitas pertambangan timah di wilayah penelitian. Teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, terutama dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman kontekstual terhadap suatu fenomena sosial (Palinkas et al., 2020). Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengorganisasi data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi

deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika yang muncul dalam fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian serta mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Dalam penelitian ini, analisis data juga dilakukan dengan menggunakan perspektif politik ekologi sebagai kerangka analisis utama. Perspektif politik ekologi digunakan untuk memahami bagaimana praktik eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh relasi kekuasaan, kebijakan negara, serta dinamika sosial yang terjadi di tingkat lokal. Politik ekologi menekankan bahwa konflik dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berkaitan dengan distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya tersebut antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda (Robbins, 2012). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika ekstraktivisme tambang timah ilegal di Balai Benih Bangka Selatan serta implikasinya terhadap lingkungan dan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Eksplorasi lingkungan dan SDA

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan timah ilegal masih berlangsung di sekitar kawasan Balai Benih Bangka Selatan. Aktivitas tersebut dilakukan secara terbuka menggunakan mesin sedot serta peralatan tambang sederhana yang beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan lingkungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik ekstraktivisme sumber daya alam masih terus berlangsung dengan orientasi utama pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial dalam jangka panjang (Erman, 2021). Aktivitas pertambangan terlihat tersebar di beberapa titik lokasi dengan kondisi lahan yang telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, aktivitas pengerukan tanah menyebabkan perubahan bentang alam yang cukup serius. Vegetasi yang sebelumnya tumbuh di kawasan tersebut banyak yang hilang akibat pembukaan lahan tambang. Tanah yang awalnya padat berubah menjadi area berlubang dan tidak stabil karena terus digali untuk mencari kandungan timah. Di beberapa titik lokasi ditemukan lubang-lubang bekas tambang yang terisi genangan air berwarna keruh dan dibiarkan tanpa adanya upaya reklamasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa setelah sumber daya diambil, lahan ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan lingkungan. Lubang-lubang bekas tambang tersebut juga berpotensi membahayakan masyarakat sekitar, terutama ketika musim hujan karena genangan air dapat menutupi kedalaman lubang sehingga sulit dikenali oleh warga maupun pengendara yang melintas di sekitar lokasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pertambangan ilegal sering meninggalkan kerusakan lahan serta lubang tambang tanpa reklamasi yang memadai (Lestari & Nugroho, 2021).



Gambar 1. Kondisi Lokasi Tambang Timah Ilegal Di Kawasan Balai Benih Bangka Selatan Hasil Observasi Lapangan Peneliti.

Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya terlihat secara fisik pada permukaan lahan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas ekosistem di sekitar kawasan Balai Benih. Aktivitas alat tambang dan pembukaan lahan menyebabkan vegetasi alami rusak dan mengurangi daya dukung lingkungan. Tanah yang terus dikeruk berpotensi kehilangan unsur hara sehingga sulit dimanfaatkan kembali untuk aktivitas produktif. Selain itu, genangan air bekas tambang juga berpotensi memengaruhi kualitas air di sekitar lokasi, terutama apabila terus bercampur dengan material sisa pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal memberikan dampak ekologis yang cukup serius dan dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila tidak ada pengendalian yang tegas. Robbins (2012) menjelaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang

dilakukan tanpa pengelolaan berkelanjutan cenderung menghasilkan degradasi lingkungan dan ketimpangan ekologis di tingkat lokal.



Gambar 2. Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Tambang Timah Ilegal.

Politik ekologi timah

Dari sisi sosial ekonomi, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat lokal. Tingginya harga timah membuat sebagian masyarakat memilih bekerja di sektor tambang karena dianggap mampu memberikan pemasukan yang lebih cepat dibandingkan pekerjaan lain. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas tambang dipandang sebagai cara paling realistis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, terutama ketika lapangan pekerjaan alternatif masih terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama masyarakat tetap terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal meskipun menyadari adanya risiko kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prabowo et al. (2023) yang menyatakan bahwa masyarakat di wilayah pertambangan sering menjadikan tambang informal sebagai strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.

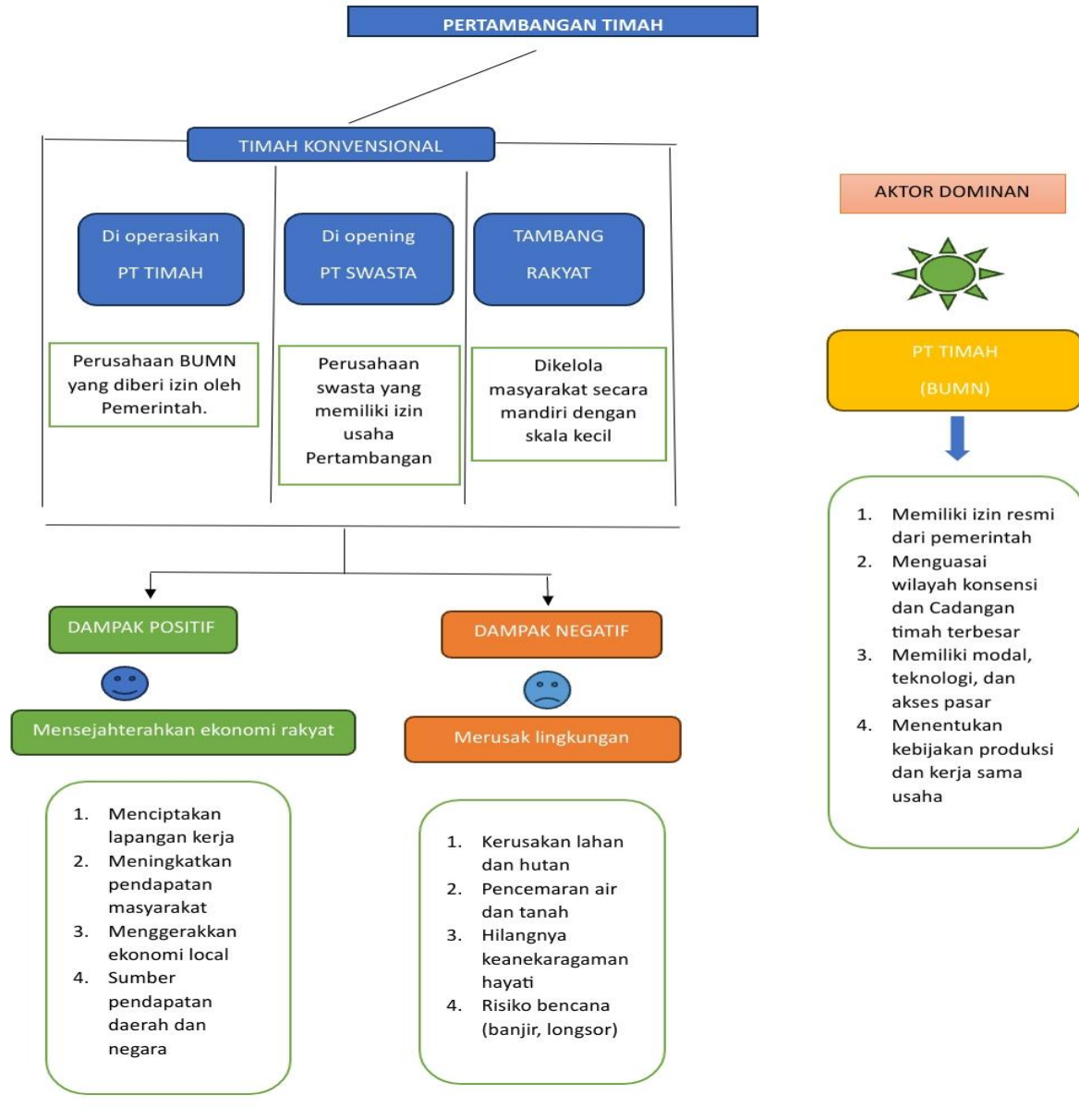
Namun demikian, ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tambang juga memunculkan persoalan sosial yang cukup kompleks. Aktivitas pertambangan menciptakan pola ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam yang sifatnya tidak berkelanjutan. Dalam jangka pendek, tambang memang mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi sebagian masyarakat, tetapi dalam jangka panjang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan justru dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Lahan yang rusak sulit dimanfaatkan kembali untuk pertanian maupun aktivitas produktif lainnya. Selain itu, apabila sumber daya timah mulai berkurang, masyarakat akan menghadapi persoalan ekonomi baru karena kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik ekstraktivisme tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial dan ekologis dalam jangka panjang (Robbins, 2012).

Jika dilihat dari perspektif politik ekologi, fenomena pertambangan timah ilegal di kawasan Balai Benih Bangka Selatan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepentingan ekonomi, akses terhadap sumber daya alam, dan relasi kekuasaan antaraktor. Aktivitas pertambangan tidak hanya melibatkan pekerja tambang atau masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan dengan pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari hasil tambang tersebut. Dalam praktiknya, terdapat jaringan kepentingan yang saling berkaitan sehingga aktivitas pertambangan ilegal dapat terus berlangsung meskipun bertentangan dengan regulasi resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga oleh relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang lebih luas. Robbins (2012) menjelaskan bahwa politik ekologi melihat eksploitasi lingkungan sebagai hasil dari hubungan kekuasaan dan distribusi akses terhadap sumber daya alam yang tidak merata.

Fenomena tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Secara normatif, aktivitas pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan adanya izin usaha, pengelolaan lingkungan, serta reklamasi pascatambang. Namun dalam kenyataannya, aktivitas tambang ilegal masih terus berlangsung di berbagai wilayah Bangka Belitung, termasuk di kawasan Balai Benih Bangka Selatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dengan kondisi nyata di lapangan. Lemahnya pengawasan serta kurang efektifnya penegakan hukum menyebabkan aktivitas tambang ilegal sulit dihentikan secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arifin, Satria, dan Adiwibowo (2023) yang menjelaskan bahwa tata kelola sumber daya mineral di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pengawasan dan implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam masih cenderung berorientasi pada eksploitasi dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali lebih dominan dibandingkan upaya menjaga fungsi ekologis

wilayah. Akibatnya, kawasan yang seharusnya memiliki fungsi tertentu justru mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Dalam konteks politik ekologi, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana distribusi akses terhadap sumber daya alam sering kali dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan relasi kekuasaan tertentu (Robbins, 2012).

Bagan yang menggambarkan proses masifnya Ti di Balai benih



Berdasarkan catatan lapangan peneliti, kondisi lokasi tambang menunjukkan kerusakan lingkungan yang cukup nyata dan mudah terlihat secara langsung. Area bekas tambang dipenuhi genangan air, tanah yang rusak, serta minimnya vegetasi di sekitar lokasi. Beberapa bagian lahan bahkan tampak tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal karena struktur tanah yang telah berubah akibat aktivitas pengerukan. Hasil observasi ini memperkuat temuan bahwa praktik pertambangan ilegal di Balai Benih Bangka Selatan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan sekitar.



Gambar 3. Alat Yang Digunakan Para Penambang Timah Ilegal

Dengan demikian, ekstraktivisme tambang timah ilegal di Balai Benih Bangka Selatan tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan ekonomi masyarakat semata, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola sumber daya alam, lemahnya pengawasan kebijakan, serta adanya relasi kepentingan antaraktor dalam penguasaan sumber daya. Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa pengendalian dan penegakan regulasi yang tegas, maka kerusakan lingkungan berpotensi semakin meluas dan memberikan dampak sosial yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat agar ketergantungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dapat dikurangi secara bertahap.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan timah ilegal di Balai Benih, Bangka Selatan, adalah fenomena yang kompleks yang melibatkan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam. Pertambangan ilegal dan kurangnya pengelolaan yang berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti perubahan bentang alam, kehilangan vegetasi, dan munculnya lubang-lubang bekas tambang yang dapat membahayakan masyarakat (Lestari & Nugroho, 2021).

Karena tidak ada pekerjaan alternatif, pertambangan ilegal menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat lokal. Ketergantungan tinggi terhadap sektor tambang menunjukkan bahwa ini dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup, meskipun membawa risiko jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Prabowo et al., 2023).

Fenomena ini menunjukkan hubungan antara kepentingan ekonomi, akses ke sumber daya alam, dan kekuasaan antaraktor dari sudut pandang politik ekologi. Bisnis pertambangan ilegal melibatkan jaringan kepentingan yang memungkinkan mereka berlanjut. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan resmi dan keadaan di lapangan (Arifin et al., 2023; Robbins, 2012).

Oleh karena itu, penanganan pertambangan ilegal memerlukan tindakan yang lebih luas, yang mencakup penegakan hukum dan peningkatan pengawasan, tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, dan akses ekonomi yang lebih baik. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di masa depan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis keadilan ekologis.

Reference

- Angraini, F. D., & Khairunnisa, K. (2025). Transformasi Ekonomi Digital Dan Kinerja Umkm: Analisis Pengaruh Digitalisasi Akuntansi Terpadu: Digital Economic Transformation And Msme Performance: An Analysis Of The Impact Of Integrated Accounting Digitalization. *Al Dzahab*, 6(2), 95–110.
- Arifin, Z., Satria, A., & Adiwibowo, S. (2023). Governance Challenges In Indonesia's Mineral Resource Management. *Resources Policy*.
- Ariyono, K. Y., Irdiana, S., & Darmawan, K. (2022). Effect Of Online Buying Experience On Customer Loyalty. *International Journal Of Social Science*, 1(5), 549–552.
- Bowen, G. A. (2020). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (5th Ed.)*. Sage Publications.
- Endrawati, T., Bangkara, B. A., Irdiana, S., Antoni, A., & Siregar, A. P. (2022). Challenge And Opportunity Of Marketing Digital-Based For Business Owners During Pandemic In Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Ijse)*, 5(2), 653–671.
- Erman, E. (2021). Politik Dan Tata Kelola Pertambangan Timah Di Bangka Belitung. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iristian, J., & Irdiana, S. (2019). Buying Experience: The Impact Of Trust And Satisfaction Of Grab Food Customers In Surabaya. *Ekspektra: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 157–164.
- Judijanto, L., Angraini, F. D., Supartha, I. K. D. G., Irmadiani, N. D., Mudjiyanti, R., & Putri, A. (2024). *Bisnis Digital: Tren Dan Perkembangannya Saat Ini*. Pt. Green Pustaka Indonesia.
- Lestari, D., & Nugroho, H. (2021). Problematika Pengelolaan Lingkungan Pada Aktivitas Pertambangan Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 5(2), 112–124.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10312>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Najoan, H. K., & Liow, F. E. R. (2023). It Value Analysis: The Case Study Of Pt. Bank Tabungan Negara, Tbk. *International Journal Of Economic Literature*, 1(2), 208–217.
- Najoan, H. K., & Mawuntu, D. J. (2023). Establish And Implement Pam And Prm Iso 20000-1: 2011. *Brilliance: Research Of Artificial Intelligence*, 3(2), 359–368.
- Palinkas, L. A., Et Al. (2020). Purposeful Sampling For Qualitative Data Collection And Analysis. *Administration And Policy In Mental Health*.
- Prabowo, R., Firmansyah, A., & Kurniawan, D. (2023). Pertambangan Informal Dan Strategi Ekonomi Masyarakat Lokal Di Wilayah Tambang Timah Bangka Belitung. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 55–66.
- Pramudito, D. K., Tubagus, M., Ismail, A., Anggraini, F. D., & Paramita, C. C. P. (2023). Application Of Support Vector Machine And Naive Bayes Method To Analyze Mobile Banking User Behavior Through Social Media Twitter. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 5, 32–38.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Routledge.
- Siahaan, F. S., Nawangwulan, I. M., Putra, H. S., Anantadjaya, S. P., & Irdiana, S. (2023). Analysis Of The Influence Of Brand Image, Digital Marketing And Product Knowledge On Customers Purchase Intention Of Banking Products. *Malcom: Indonesian Journal Of Machine Learning And Computer Science*, 3(2), 199–204.
- Suhara, A., Supriandi, S., & Priyana, Y. (2026). Swot Analysis Of Artificial Intelligence Implementation In Digital Business Models In Indonesia. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(4), 313–319.
- Yin, R. K. (2021). *Case Study Research And Applications*. Sage Publications.